



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



@dprdprovsumbar



@dprdsumbar



DPRD Provinsi Sumatera Barat



dprd.sumbarprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia serta ridhaNya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam kita sampaikan dihadapan ikutan kita, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik serta memberikan layanan yang optimal kepada seluruh stakeholders demi terwujudnya visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Profesional dan Modern. Laporan kinerja dapat digunakan untuk mengukur capaian kerja, melakukan evaluasi, dan meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor: 100.3.4.1/373/ED/GSB-2025 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dengan telah disusunnya Laporan ini diharapkan terlaksananya perbaikan terhadap pola pikir organisasi terhadap konsep pelayanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretariat DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri atas 2(dua) indikator dan target kinerja yang kami perjanjikan di tahun 2025. Diantara 2 indikator tersebut, 1 indikator berhasil mencapai target yaitu tercapainya indeks kepuasan pemangku kepenetingan, sedangkan 1 indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (98,84%).

Untuk indikator kinerja yang sudah mencapai target, akan ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga selalu ada perbaikan yang berkesinambungan. Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum mencapai target, akan dilakukan evaluasi mendalam. Hal tersebut sangat penting agar Pimpinan dan unit kerja yang menjadi pengampu dapat memetakan antara akar masalah



dan *Symptoms* (gejala). Kedua konsep ini sangat penting dalam penyelesaian masalah karena keduanya menuntun kita menuju solusi yang efektif. Memahami perbedaan di antara keduanya sangat penting untuk mengatasi masalah dan mencegah terulang kembali. Saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi nyata dari budaya ASN BerAKHLAK yaitu Akuntabel dan Kolaboratif.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Padang, Januari 2026

Sekretaris DPRD Provinsi
Sumatera Barat



Drs. MAIFRIZON, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Tabel Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (79,08)	98,84
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,05	92,02	100,74

Tingkat Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 mencapai 100,74% yang didukung oleh pencapaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani capaian kinerja sebesar 98,84%. Adapun program dan



kegiatan yang menjadi *core* dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitas terhadap agenda DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitas terhadap agenda DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitas terhadap agenda DPRD

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Penghargaan	ix
I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Struktur Organisasi	1
1.1.4 Sumber Daya Manusia	3
1.2 Aspek Strategis Organisasi	4
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	5
II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	10
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	11
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	12
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025	43
IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	52

DAFTAR TABEL

1.1	Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan	3
1.2	Keadaan personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon	3
1.3	Keadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	4
1.4	Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan	4
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026	7
2.2	Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.3	Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Perubahan Tahun 2025	9
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
3.2	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
3.3	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	13
3.4	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian	14
3.5	Predikat Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD	15
3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025	17
3.7	Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPRD RI tahun 2024	18
3.8	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2025	22
3.9	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	23
3.10	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	26
3.11	Daftar Pertanyaan Indeks Kepuasan	28
3.12	Persentase Total penilaian masing-masing dimensi selama Semester 1 dan 2 Tahun 2025	29
3.13	Skor Penilaian Pemangku Kepentingan Lainnya Pelayanan Secara Umum Semester 1 dan 2	32
3.14	Hasil Pengukuran Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2025	33



3.15	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	33
3.16	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan Tahun 2025	35
3.17	Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPR RI tahun 2024	36
3.18	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	41
3.19	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	42
3.20	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	45
3.21	Realisasi Anggaran Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja	46



DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Struktur Sekretariat DPRD	2
3.1	Nilai AKuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian Tahun 2025	14
3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan tahun sebelumnya	16
3.3	Perkembangan rata-rata Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	18
3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pemang Kepentingan dengan tahun sebelumnya	34
3.5	Perkembangan rata-rata Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	35
3.6	Realisasi Belanja per Program Tahun 2025	44

PENGHARGAAN

1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2025 Kategori Organisasi Perangkat Daerah sebagai Badan Publik Informatif
2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2025 Peringkat Ke-2 (Dua) Kategori Organisasi Perangkat Daerah



TIM AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD



**PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Maifrizon, M.Si	Sekretaris DPRD	Ketua Pelaksana
2	Udlil Iman Zul, ST	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Wakil Ketua Pelaksana
3	Yasmin, SE, MM	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Ismelda Jenreini, S.STP, MM	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
5	Habiburrahman Al Ambari, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota
6	Yosmar Reskiarsih, SH	Analisis Kepegawaian	Anggota
7	Rio Eka Putra, SE	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota
8	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota
9	Dahrul Idris, S. STP, MM	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
10	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
11	Eli Suryani, S.Kom	Penelaah Tekhnis Kebijakan	Anggota
12	Alfitriyandi, SE	Penata Layanan Operasional	Anggota



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang pemerintahan dan hukum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 1 (satu) Sub Bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni Perencana, Analis Kepegawaian, Perisalah, Pustakawan dan Arsiparis.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

1.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari: Sub Bagian Rumah Tangga.
- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.
- c) Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar



1.1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kondisi bulan Desember tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 101 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	21 orang	Keadaan Desember 2025
2	Strata 1	34 orang	
3	Diploma 4	4 orang	
4	Diploma 3	5 orang	
5	SLTA	20 orang	
6	SMP	-	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.2
Keadaan Personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	10 orang	Keadaan Desember 2025
2	Golongan III	63 orang	
3	Golongan II	11 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	1 orang	
5	Fungsional	8 orang	
5	Staf	72 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	3 orang	Keadaan Desember 2025
2	Diploma 3	1 orang	
	J u m l a h	4 orang	

Tabel 1.4
Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	4 orang	Keadaan Desember 2025
2	Diploma 3	2 orang	
4	SLTA	7 orang	
	J u m l a h	13 orang	

Selain pegawai baik PNS, P3K dan PTT, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sumber daya manusia antara lain:

1. Tenaga Ahli Fraksi
2. Tenaga Pramusaji
3. Tenaga *Outsourcing* (*Cleaning Service*, Sopir, dan *Security/Satpam*)

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengamanatkan untuk membangun ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu: Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan *spirit* yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Selanjutnya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 mengamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan pelayanan antara lain:

- 1) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- 5) Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 6) Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 7) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Melalui sasaran 1 (satu) dan 3 (tiga) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatnya organisasi yang akuntabel, dengan indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran dan indikator sasaran yang dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
2. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan diukur melalui 2 (dua) komponen penilaian yaitu kepuasan Anggota DPRD dan Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel	Nilai AKuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	90	90	90	90	90	90
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	A	A	A	A	A	A

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 (satu) yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke

dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Tabel 2.2
Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)
2	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	91,34

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 98.925.420.850,-	APBD
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 93.743.956.866,-	APBD
Jumlah	Rp. 192.669.377.716,-	

Terdapat perubahan anggaran pada tahun 2025 sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

Program	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 98.925.420.850,-	Rp. 97.706.299.972,-
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 93.743.956.866,-	Rp. 85.087.153.370,-
Jumlah	Rp. 192.669.377.716,-	Rp. 182.793.453.342

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

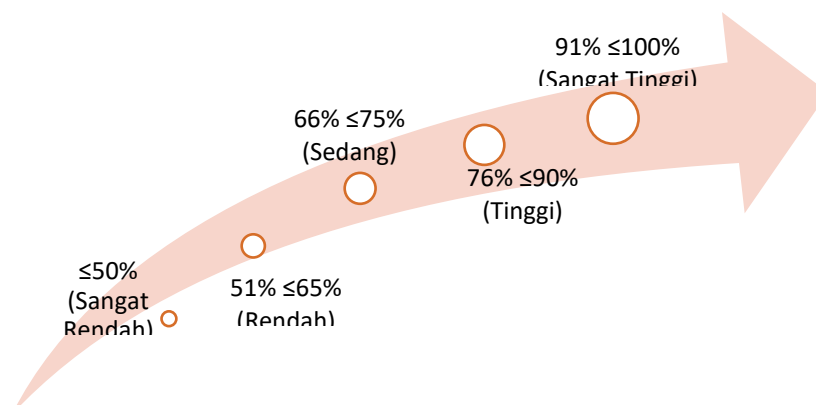
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Berikut penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran yang berbentuk tabel yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 Permendagri 86 Tahun 2017:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri RI No. 86 Tahun 2017

Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kriteria
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (79,08)	98,84	Sangat Tinggi
2.	Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	91,34	92,02	100,74	Sangat Tinggi
Rata-rata Kinerja Tahun 2025					99,79	Sangat Tinggi

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran dapat dikatakan "belum berhasil", karena masih ada satu target sasaran yang baru tercapai sebesar 98,84% yaitu sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 di atas, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/131/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 79,08 atau predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan bahwa AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Analisis penetapan target kinerja untuk Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” adalah mengacu pada target Renstra tahun 2021-2026 dan nilai akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan penetapan target pada Renstra mengacu pada realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2020 yaitu 75,03 (BB) sehingga Sekretariat menetapkan target Renstra dengan nilai 80,01 dengan Kategori A. Pada tahun tahun 2021 nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah 75,10 dengan Kategori BB, tahun 2022 adalah 76,71 dengan kategori BB, pada tahun 2023 adalah 77,07 dengan kategori BB dan pada tahun 2024 adalah 79,08 dengan kategori BB. Melihat nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD tersebut, dan karena belum tercapainya target pada tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025 Sekretariat menginisiasi penetapan target kinerja berdasarkan kesepakatan dengan Biro Organisasi dengan predikat A atau dengan nilai 80,01. Dengan harapan untuk tahun 2025 Sekretariat mampu mencapai nilai A sesuai target yang telah ditetapkan.

❖ Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	79,08	98,84

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Sekretariat DPRD target 80,01 terealisasi 79,08 dengan capaian 96,33% termasuk kategori “**belum berhasil**”

- ❖ Cara menghitung/ mengukur Realisasi serta Data Dukung.

Realisasi nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD yang tercapai 98,84 didapat melalui hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **79,08**, dengan kategori **BB**. Hal ini menunjukkan bahwa AKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

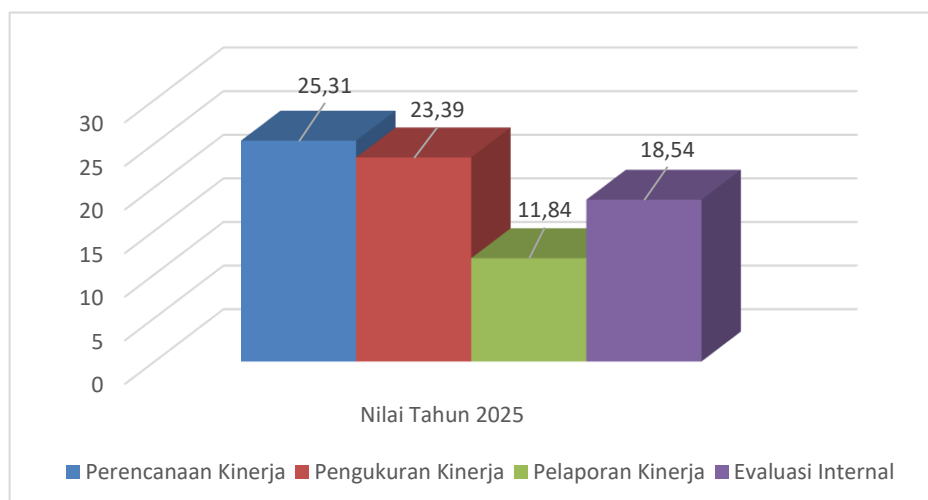
Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja per komponen penilaian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian

No	Komponen Pengukuran	Bobot	Skor tahun 2024	Persentase capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	25,31	84,37
2	Pengukuran Kinerja	30	23,39	77,97
3	Pelaporan Kinerja	15	11,84	78,93
4	Evaluasi Internal	25	18,54	74,16
	Nilai Hasil SAKIP		79,08	

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Gambar 3.1
Nilai AKuntabilitas Kinerja Per Komponen Penilaian Tahun 2025



Berdasarkan tabel di atas, predikat nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD tergolong "Sangat Baik". Predikat hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah :

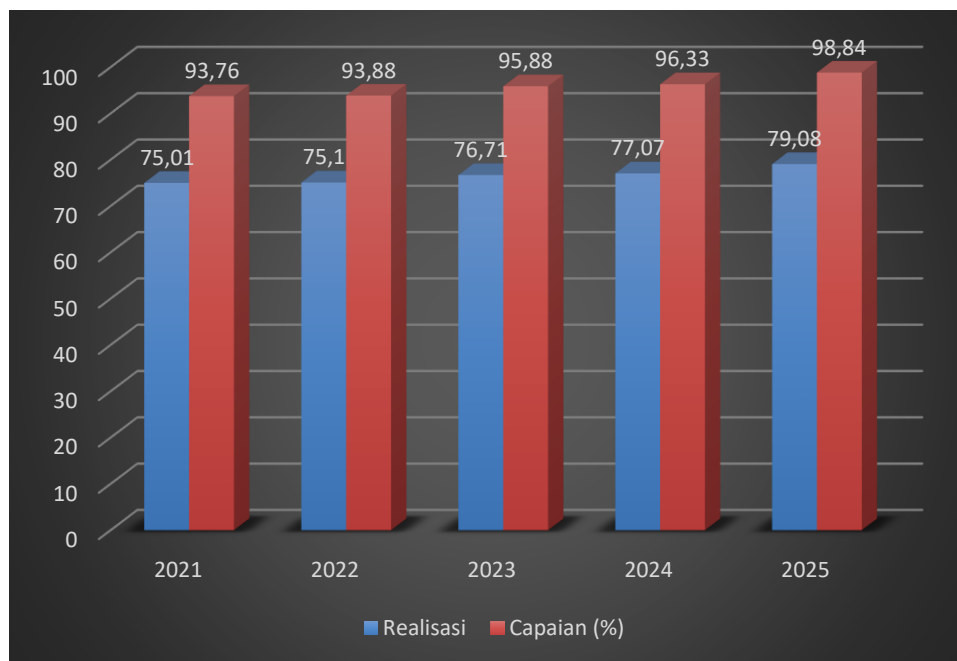
Tabel 3.5
Predikat Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

- ❖ Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025 didapat dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Capaian 98,84%, merupakan capaian yang baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD mengalami kenaikan 2,51% di tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan capaian, nilai akuntabilitas kinerja OPD tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan tahun sebelumnya



Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan, tingkat pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja sebagai subjek penilaian masih kurang. Kondisi ini menjadi perhatian Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat kedepannya.

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), nilai akuntabilitas kinerja OPD ditargetkan dapat tercapai 80,01 (predikat Memuaskan). Jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	79,08	98,84	80	98,85

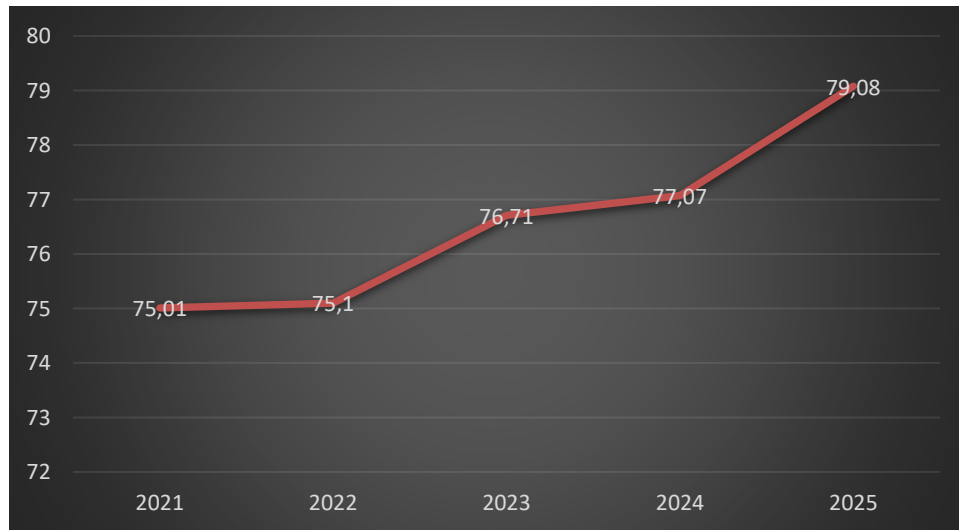
Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat Tahun 2025 oleh Inspektorat

Saat ini, capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baru mencapai 98,84% dari target predikat Memuaskan (A) dengan nilai minimal 80,01 atau terdapat selisih 0,93 poin. Artinya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan, namun sudah hampir mendekati. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja oleh ASN Sekretariat DPRD. Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang merupakan cerminan kinerja internal Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bersih, akuntabel dan profesional diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan angka capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 98,84% dengan kategori predikat tinggi. Analisis Faktor penghambat/kendala dalam pencapaian target indikator kinerja.

- ❖ Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun terakhir.

Gambaran nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, menunjukkan nilai yang fluktuatif. Rata-rata berada pada interval Sangat Baik. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2021 s/d 2025 disajikan pada grafik di bawah:

Gambar 3.3
Perkembangan rata-rata Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD



- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak memiliki standar nasional, namun dapat disajikan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk capaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPR RI tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)	B (68,92)	86,15%

- ❖ Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat, antara lain:

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Kurangnya pemahaman ASN atas perjanjian kinerja individu.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Membuat Rencana Aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
2. Telah dilakukan pemberian Punishment terhadap kinerja individu dalam bentuk pemotongan TPP.
3. Pemberian Reward untuk ASN yang berkinerja baik dalam menyelesaikan administrasi keuangan.
4. Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja.
5. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Kinerja Sasaran Renstra serta Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta akumulasi kinerja dibandingkan dengan target akhir Renstra.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kinerja, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran sehingga dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Koordinator dan Staf.
2. Mendorong bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan bersama dengan Bagian Umum dan Keuangan menyusun rencana aksi.
3. Melakukan dialog kinerja secara terus menerus
4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Renja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas.
5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD
7. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak.

8. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya.
9. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan RB dapat terimplementasi sampai ke level individu.
 - ❖ Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD telah mengupayakan efisiensi Penggunaan Sumber Daya di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah pada pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kerja dan Anggaran. Pada ketiga aspek tersebut seluruh pelaksanaan kegiatannya telah berbasis digital, pada aspek Perencanaan menggunakan Aplikasi SIPD, pada aspek pengukuran menggunakan Aplikasi Sakato Plan, dan pada aspek pelaporan menggunakan aplikasi E-SAKIP, dengan penggunaan aplikasi tersebut maka penggunaan kertas untuk penyampaian usulan anggaran dan pelaporan capaian output dari seluruh unit kerja ke Bagian Perencanaan menjadi berkurang karena dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja tujuan ke-1 yaitu Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel yang diukur melalui sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2025 telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 97.706.299.972,-. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 10 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 97.706.299.972,- terealisasi Rp.94.837.645.492,- atau 97,06%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.2.868.654.480,- (2,94%). Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja modal.
- Efisiensi belanja barang cetakan.
- Efisiensi belanja perjalanan dinas.
- Efisiensi belanja Kesehatan Anggota DPRD.

- Efisiensi belanja makanan dan minuman.
- Efisiensi belanja pemeliharaan dengan membangun aplikasi yang dapat mengontrol pemakaian belanja pemeliharaan kendaraan dinas, sehingga terjadi pengurangan belanja pemeliharaan kendaraan dinas.

Tingkat efisiensi diperoleh dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Sumber : PMK RI Nomor 22/PMK.02/2021

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD yaitu pada capaian 98,84% dengan realisasi anggaran sebesar 97,06% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,02%, dengan nilai efisiensi sebesar 54,44%. Artinya efisiensi pada sasaran I sebesar **100%** dan sudah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD yang diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	79,08	98,84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	97.706.299.972	94.837.645.492	97,06
Capaian Kinerja					98,84	Capaian Anggaran	97.706.299.972	94.837.645.492	97,06
$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$ <p>Tingkat Efisiensi = 0,02</p> $\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50$ <p>Nilai Efisiensi = 54,44%</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
		SEKRETARIAT DPRD	182.793.453.342	168.371.606.081
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	97.706.299.972	94.837.645.492
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.627.900	218.148.400
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.054.900	83.920.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	43.258.000	42.913.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.315.000	91.315.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.620.454.300	12.159.673.468
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.454.765.800	11.099.572.968
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.020.977.500	915.389.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144.711.000	144.711.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	523.012.581	497.254.424
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	502.144.581	491.026.424
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.868.000	6.228.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.322.380.922	6.718.395.636
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.621.900	76.621.900
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.406.140	56.351.140
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	995.436.791	809.238.772
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.092.367.660	949.762.055
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	551.240.731	489.243.675
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	399.335.000	377.350.800
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.164.262.500	1.015.046.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.323.160.200	2.314.336.494
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.050.000	18.240.000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	643.500.000	612.204.300
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.172.651.199	6.109.623.008
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.293.500.000	3.293.500.000
		Pengadaan Mebel	875.546.271	847.787.852
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.601.496.598	1.574.980.170
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.005.400	73.005.400

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.102.930	320.349.586
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.283.121.618	14.382.277.368
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.500.000	45.120.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.805.038.640	2.416.559.957
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	1.415.388.616	1.284.270.986
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.015.194.362	10.636.326.425
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.183.795.452	11.605.949.029
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.500.000	147.134.979
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	973.338.000	870.602.373
		Pemeliharaan Mebel	153.500.000	147.776.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.790.000	47.645.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.022.344.978	4.780.632.620
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.441.995.223	4.325.891.478
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.362.327.251	1.286.266.579
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	42.698.677.400	42.513.208.927
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.439.992.400	41.385.673.927
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.060.435.000	1.060.435.000
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	198.250.000	67.100.000
		Layanan Administrasi DPRD	682.578.600	633.115.232
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	0
		Fasilitasi Fraksi DPRD	99.125.000	64.580.000
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	101.700.000	90.998.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	481.753.600	477.537.232



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bab III bagian kesatu pasal 25 menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi. Hal tersebut mempertegas bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi organisasi pelayanan, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, **Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan** ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan". Sasaran meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan".

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei ini juga merupakan salah satu target kinerja Sekretariat DPRD dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengolahan data juga dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana persepsi pemangku kepentingan dalam hal ini Anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya (masyarakat yang berkunjung ke Sekretariat DPRD) terhadap layanan publik yang diberikan yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survei kepuasan anggota

DPRD dan pemangku kepentingan lainnya pada Sekretariat DPRD yang melaksanakan survei pada tahun n.

- ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan

Analisis penetapan target kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan” mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025. Target kinerja tersebut disusun secara berjenjang dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD, serta mendukung pelaksanaan fungsi fasilitasi, pelayanan administrasi, dan dukungan teknis kepada DPRD. Penetapan target pada Renstra 2025-2029 mengacu pada hasil indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun-tahun sebelumnya yaitu antara tahun 2021-2024 dengan rentang nilai >90 yaitu dengan kriteria “Sangat Memuaskan”. Sedangkan untuk target tahun 2025 ditetapkan dengan dasar realisasi tahun 2024 yaitu 91,34, sehingga target utk tahun selanjutnya berada pada rentang 91,34 s/d 91,40. Selain itu penetapan target indeks kepuasan pemangku kepentingan juga mengacu pada analisis SWOT yang mengemukakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam penilaian indeks kepuasan pemangku kepentingan.

- ❖ Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)
Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	91,34	92,02	100,74

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan target 91,34 terealisasi 92,02 dengan capaian 100,74% termasuk kategori keberhasilan “**Sangat Memuaskan**”

❖ Cara menghitung/ mengukur Realisasi serta Data Dukung.

Realisasi indeks kepuasan pemangku kepentingan di dapat dari hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) dengan melakukan survei terhadap anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya (masyarakat) dengan 2 (dua) kali survey yaitu pada semester 1 (Januari s/d Juni) dan semester 2 (Juli s/d Desember).

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Kepada Pemangku Kepentingan, yang dinilai melalui 2 (dua) penilaian yaitu survei terhadap Anggota DPRD dan survei terhadap pemangku kepentingan lainnya. Dengan rumus:

$$\text{Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan} = (\text{Kepuasan Anggota DPRD} * 80\%) + (\text{Kepuasan pemangku kepentingan lainnya} * 20\%)$$

Sumber data penghitungan indeks kepuasan pemangku kepentingan diolah dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025 yang terdiri atas 2 penilaian yaitu 1) Kepuasan Anggota DPRD, dan 2) Kepuasan Masyarakat. Berikut penjelasan pengukuran/ penghitungan indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan :

1) Kepuasan Anggota DPRD

Untuk anggota DPRD jumlah responden berjumlah 65 orang, yang mencakup responden dari 7 Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jumlah responden ini diambil dengan rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 97%, *margin of error* = 2,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 60 responden.

Rumus penilaian survei Anggota DPRD adalah:

$$\text{Kepuasan Anggota DPRD} = (\text{Penilaian Dukungan Sumber Daya Manusia} * 20\%) + (\text{Penilaian Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas} * 20\%) + (\text{Penilaian Penyediaan Sarana dan Prasarana} * 20,5\%) + (\text{Penilaian Pelayanan Publik} * 19,5\%) + (\text{Penilaian Pelayanan Keuangan} * 20\%)$$

Adapun tahap survey yang dilakukan kepada Anggota DPRD adalah:

- a. Tahapan persiapan dengan membuat daftar pertanyaan sesuai indikator yang berhubungan dengan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Daftar Pertanyaan Indeks Kepuasan

No.	Uraian Pertanyaan
I	Data Diri
1.	Nama
2.	Jabatan
3.	Jenis Kelamin
4.	Umur
5.	Pendidikan Terakhir
6.	Daerah Pemilihan
7.	Komisi
Beri Penilaian Pernyataan Berikut dengan Nilai: 5 : Sangat Puas (SP) 2 : Tidak Puas (TP) 4 : Puas (P) 1 : Sangat Tidak Puas (STP) 3 : Kurang Puas (KP)	
II	Dukungan Sumber Daya Manusia
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir).
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan).
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja.
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan).
7.	Pelayanan dalam penyiapan logistik (ATK, Kertas, dll).
III	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas.
9.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas.
10.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan.
11.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas.
12.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
13.	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan).
IV	Penyediaan Sarana dan Prasarana
14.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana).
15.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana).
16.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana).
17.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin).
18.	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD).
V	Pelayanan Publik

19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD.
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online.
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu.
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu.
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD.
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat.
25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat.
VI	Pelayanan Keuangan
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
27.	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan.
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD.
29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan.

b. Tahap Pengolahan Data

Total nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD diperoleh dari pengolahan data IKM dari masing-masing fraksi, sehingga diperoleh persentase masing-masing dimensi penilaian selama 1 tahun yaitu gabungan dari penilaian semester 1 dan 2. Berikut persentase total masing-masing dimensi penilaian.

Tabel 3.12
Persentase Total penilaian masing-masing dimensi selama Semester 1 dan 2 Tahun 2025

1 Dukungan Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Rentang Kinerja Semester 1 (%)	Rentang Kinerja Semester 2 (%)	Rentang Kinerja 1 Tahun (%)
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,66	97,76	96,00	96,88
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,59	89,89	90,53	90,21
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	4,41	92,69	97,50	95,10
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	4,38	88,90	89,42	89,16
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	4,38	85,83	86,80	86,32
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	4,52	88,54	87,73	88,14

7	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	4,52	85,38	86,40	85,89
		4,49	89,86	90,63	90,25
2 Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Rentang Kinerja Semester 1 (%)	Rentang Kinerja Semester 2 (%)	Rentang Kinerja 1 Tahun (%)
8	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	4,72	96,37	94,71	95,54
9	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	4,59	88,06	88,23	88,15
10	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	4,72	90,70	90,51	90,61
11	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	4,34	88,63	94,23	91,43
12	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	4,52	92,15	97,14	94,65
13	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	4,34	88,63	93,26	90,95
		4,54	90,76	93,01	91,89
3 Penyediaan Sarana dan Prasarana					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Rentang Kinerja Semester 1 (%)	Rentang Kinerja Semester 2 (%)	Rentang Kinerja 1 Tahun (%)
14	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,76	95,17	97,14	96,16
15	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,69	98,48	102,50	100,49
16	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,69	89,10	87,76	88,43
17	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	4,62	92,41	92,38	92,40
18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	4,45	88,97	89,52	89,25
		4,64	92,83	93,86	93,35
4 Pelayanan Publik					

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Rentang Kinerja Semester 1 (%)	Rentang Kinerja Semester 2 (%)	Rentang Kinerja 1 Tahun (%)
19	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	4,72	99,21	99,00	99,11
20	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	4,59	102,73	100,80	101,77
21	Penyediaan Informasi terhadap tamu	4,52	88,54	89,60	89,07
22	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	4,52	82,21	80,60	81,41
23	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	4,48	81,59	79,73	80,66
24	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	4,55	89,21	83,53	86,37
25	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	4,31	90,52	90,00	90,26
		4,53	90,57	89,04	89,81
5 Pelayanan Keuangan					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Rentang Kinerja Semester 1 (%)	Rentang Kinerja Semester 2 (%)	Rentang Kinerja 1 Tahun (%)
26	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4,62	94,26	94,71	94,49
27	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	4,48	89,66	90,48	92,67
28	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	4,48	91,45	89,86	90,07
29	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	4,28	82,10	83,20	82,65
		4,47	89,37	89,56	89,47
INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT					91,93
					SANGAT PUAS

2) Kepuasan Pemangku Kepentingan Lainnya (Masyarakat)

Survei pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner seperti halnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan

cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum. Berikut gambaran penilaian terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya selama tahun 2025

Jumlah tamu dan pemangku kepentingan lainnya yang berkunjung ke DPRD selama tahun 2025 sebanyak 2.512 orang. Dari sejumlah tamu yang datang ke DPRD, sebagian besar tamu berpartisipasi dalam memberikan penilaian pelayanan, hal tersebut dipengaruhi oleh keaktifan staf penunggu tamu dan resepsionis dalam menghimbau tamu untuk memberikan respon atas pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun jumlah tersebut dinyatakan valid, dan dengan rincian pilihan sebagai berikut:

Sangat Puas	=	1500	orang
Puas	=	1012	orang
Tidak puas	=	0	orang

Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan metode perhitungan terhadap Anggota DPRD maka diperoleh Skor sebagai berikut:

Tabel 3.13
Skor Penilaian Pemangku Kepentingan Lainnya
Pelayanan Secara Umum Semester 1 dan 2

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 3	Rentang Kinerja Semester 1 (%)	Rentang Kinerja Semester 2 (%)	Rentang Kinerja 1 Tahun (%)
1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	2,62	91,30	93,50	92,40
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada pemangku kepentingan lainnya adalah:					Sangat Puas

Berdasarkan metode yang telah ditetapkan maka masing-masing objek pengukuran akan mendapat presentase yang berbeda. Pengukuran untuk anggota DPRD memiliki porsi pengukuran sebesar 80% dan pemangku kepentingan lainnya memiliki porsi 20%. Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Pengukuran Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Komponen Pengukuran	Bobot Penilaian (%)	Nilai Per Komponen	Skor tahun 2025	Capaian
A.	Anggota DPRD	80	91,93	73,54	
B.	Pemangku Kepentingan Lainnya	20	92,40	18,48	
Total		100		92,02	100,74
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD adalah:				Sangat Puas	

Sumber Data : LPPM Unand, data diolah

Dari tabel dan grafik di atas diperoleh bahwa dari seluruh komponen pernyataan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pemangku Kepentingan sudah tercapai 100%

Berdasarkan tabel di atas, survei kepuasan terhadap pemangku kepentingan tergolong "Sangat Baik". Predikat survei kepuasan pemangku kepentingan sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.15
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan

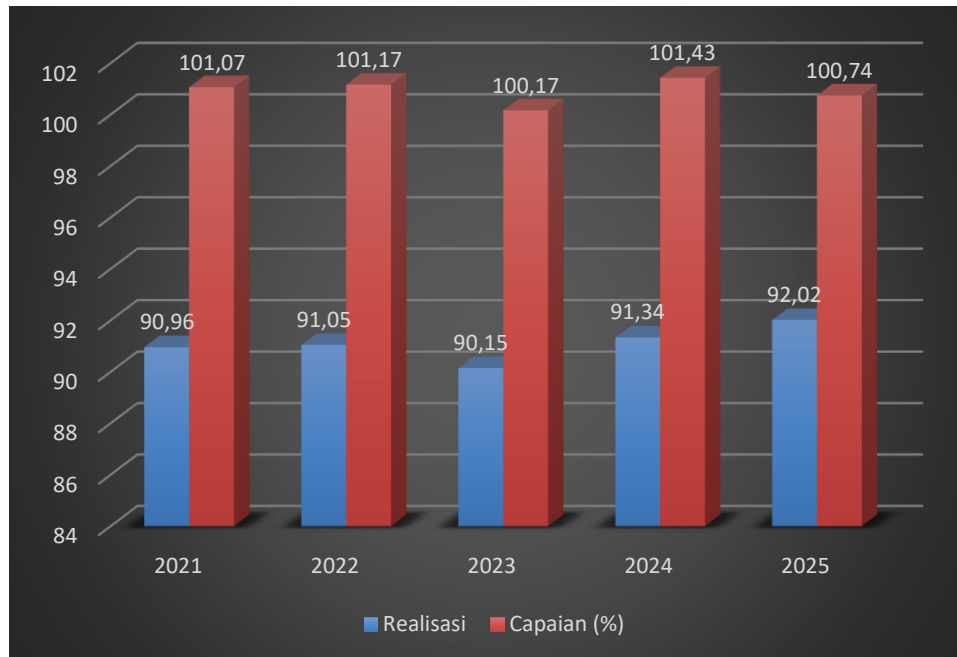
Nilai	Nilai Internal Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber Permen PAN RB nomor 14/2017

- ❖ Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator indeks kepuasan pemangku kepentingan tahun 2025 yang didapat dari LPPM Unand diukur dengan metode kuantitatif. Capaian 102,84%, merupakan capaian yang memuaskan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indeks kepuasan pemangku kepentingan mengalami kenaikan 1,41% di tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan capaian, indeks kepuasan pemangku kepentingan tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 s/d 2025 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan tahun sebelumnya



Pencapaian indeks kepuasan pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Bila dibandingkan dengan target Indikator pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, nilai indikator ini telah mencapai 102,84% dari target jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pada Tabel di bawah terlihat bahwa realisasi indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dimasa yang akan datang, perlu penyesuaian target yang lebih menantang agar dapat memacu kinerja pegawai lebih baik lagi.

Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan Tahun 2025

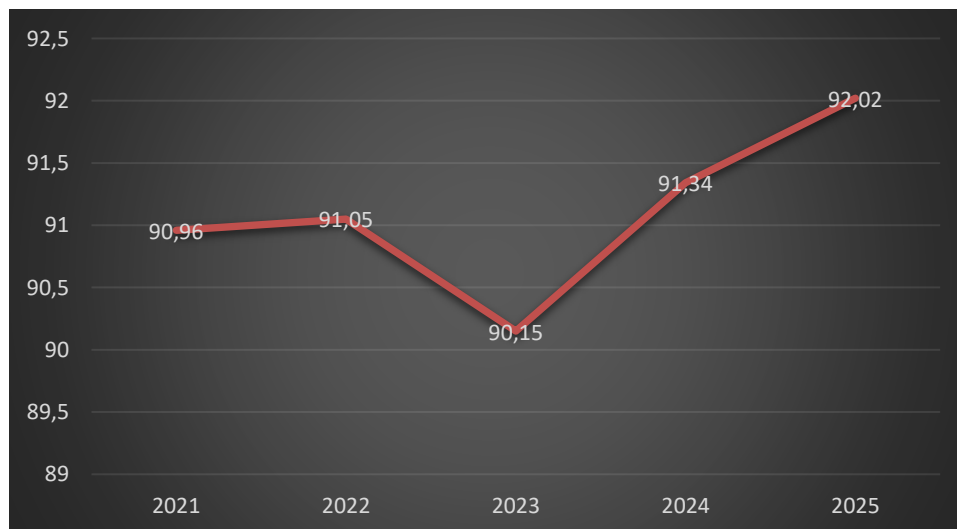
No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
2.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	91,34	92,61	102,84	90	102,90

Sumber data : data diolah

- ❖ Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir.

Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2021 s/d 2025 disajikan pada grafik di bawah:

Gambar 3.5
Perkembangan rata-rata Indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan



Gambaran indeks kepuasan pemangku kepentingan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, menunjukkan nilai yang fluktuatif. Rata-rata berada pada interval Sangat Baik, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan indeks. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya pelayanan keuangan terkait dengan penerapan Perpres 53 tahun 2023, dimana anggota DPRD menginginkan pembayaran biaya perjalanan dinas secara *Lumpsum*, namun Peraturan Daerah atau turunannya belum mengatur aturan pembayaran secara *lumpsum*. Hal ini lah yang menjadi polemik bagi bagian umum dan keuangan untuk mengakomodir permintaan anggota

DPRD tersebut. Sehingga pemangku kepentingan merasa mendapatkan pelayanan yang kurang dari segi keuangan.

- ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak memiliki standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun instansi lainnya. Daftar pertanyaan survei (kuesioner) didasarkan pada unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Lampiran I Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan tidak memiliki standar nasional, namun dapat disajikan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk capaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi IKU Sekretariat DPR RI tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,74	3,74	100 %	Melebihi Target

- ❖ Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, dengan merekrut tenaga alih daya untuk membantu melayani dan memfasilitasi Anggota DPRD dengan membelanjakan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, seperti penyediaan ruang kerja dan ruang rapat yang representatif dengan selalu melakukan pemeliharaan-

pemeliharaan rutin berkala dengan menggunakan sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

3. Meningkatkan fasilitas penunjang seperti IT dengan dilakukannya pengadaan tablet untuk seluruh Anggota DPRD menggunakan anggaran pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Selain pengadaan tablet fasilitas penunjang lainnya adalah pemeliharaan jaringan baik jaringan listrik maupun jaringan internet dengan membelanjakan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.
4. Meningkatkan dukungan kegiatan Anggota DPRD dengan melakukan dokumentasi seluruh kegiatan Anggota DPRD dan mempublikasikannya ke media sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat menggunakan anggaran pada sub kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan.
5. Pelaksanaan survei kepuasan Anggota DPRD guna mendukung kinerja Sekretariat DPRD dengan melakukan kerja sama bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) UNAND dan menggunakan anggaran pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Meningkatkan pelayanan administrasi dan persidangan dengan memfasilitasi rapat-rapat DPRD secara tepat waktu dan sesuai tata tertib Anggota DPRD. Hal ini sesuai dengan sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
7. Meningkatkan dukungan pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD dengan menyusun SK staf pendamping reses untuk setiap masa sidang, hal ini dibebankan pada sub kegiatan pelaksanaan reses.
8. Penguatan dukungan fungsi *budgeting* Anggota DPRD yaitu perencanaan dan penganggaran dengan memfasilitasi seluruh kegiatan pembahasan kebijakan anggaran.

Faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kinerja pada setiap dimensi penilaian, diantaranya:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia,

Jumlah pegawai Sekretariat DPRD belum memenuhi peta jabatan yang ada sehingga beban kerja belum sebanding dengan intensitas kegiatan DPRD (rapat, kunjungan kerja, reses, pembahasan perda) dan terjadi perangkapan tugas pada

beberapa pegawai sehingga pelayanan tidak optimal. Upaya dalam mengatasi masalah sumber daya manusia ini adalah dengan merekrut tenaga asoring sebagai tenaga tambahan dalam menyelesaikan persoalan administrasi dan pelayanan kedewanan. Selain itu pimpinan Sekretariat DPRD secara berkala melakukan evaluasi internal kinerja terhadap pegawai Sekretariat DPRD.

2. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas,

- Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas yang masih lemah.
- Pengelolaan administrasi perjalanan dinas masih didominasi proses manual.
- Sistem informasi pendukung belum terintegrasi secara penuh sehingga meningkatkan risiko keterlambatan dan kesalahan administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan tenaga IT untuk membangun aplikasi guna mendukung kelancaran administrasi perjalanan dinas.

3. Pelayanan Publik,

Dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya penerimaan aspirasi masyarakat kepada DPRD, Sekretariat DPRD masih menghadapi kendala berupa tingginya volume dan keragaman aspirasi, keterbatasan SDM pengelola, serta belum optimalnya mekanisme penerimaan dan pengelolaan aspirasi secara terintegrasi. Selain itu, koordinasi lintas pihak dan keterbatasan dokumentasi berbasis data turut mempengaruhi kecepatan dan kualitas penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD. Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait aplikasi Sakato plan yang mampu menampung aspirasi secara langsung oleh masyarakat.

4. Pelayanan Keuangan,

- Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani administrasi pertanggungjawaban keuangan masih terbatas dibandingkan volume dokumen yang harus diselesaikan.
- Beban kerja meningkat pada periode tertentu, seperti akhir bulan dan akhir tahun anggaran.

Upaya yang dilakukan adalah memberdayakan tenaga alih daya dalam penyelesaian administrasi keuangan.

- ❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mendukung pencapaian keberhasilan sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi, diantaranya:

1. Sarana dan prasarana yang memadai telah dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan utama DPRD;

2. Podcast DPRD Sumbar

Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi secara langsung yang mendukung pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan kepada pemangku kepentingan serta merespon aspirasi masyarakat luas.

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, pada Tahun 2025 juga telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan dengan 7 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebesar Rp. 85.087.153.370,-. Dan terealisasi sebesar Rp. 73.533.960.589,- atau 86,42%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.553.192.781,- (13,58%).

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja perjalanan dinas

Tingkat efisiensi diperoleh dengan rumus :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

Sumber : PMK RI Nomor 22/PMK.02/2021



Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yaitu pada capaian 100,74% dengan realisasi anggaran sebesar 86,42% diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,14%, dengan nilai efisiensi sebesar 85,80%. Artinya efisiensi pada sasaran II sebesar **100%** dan sudah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan.

Selanjutnya, anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Program	Anggaran Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	91,34	92,02	100,74	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	85.087.153.370	73.533.960.589	86,42
Capaian Kinerja					100,74	Capaian Anggaran	91.806.034.698	73.533.960.589	86,42
$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$ <p>Tingkat Efisiensi = 0,14</p> $\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50$ <p>Nilai Efisiensi = 85,80%</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

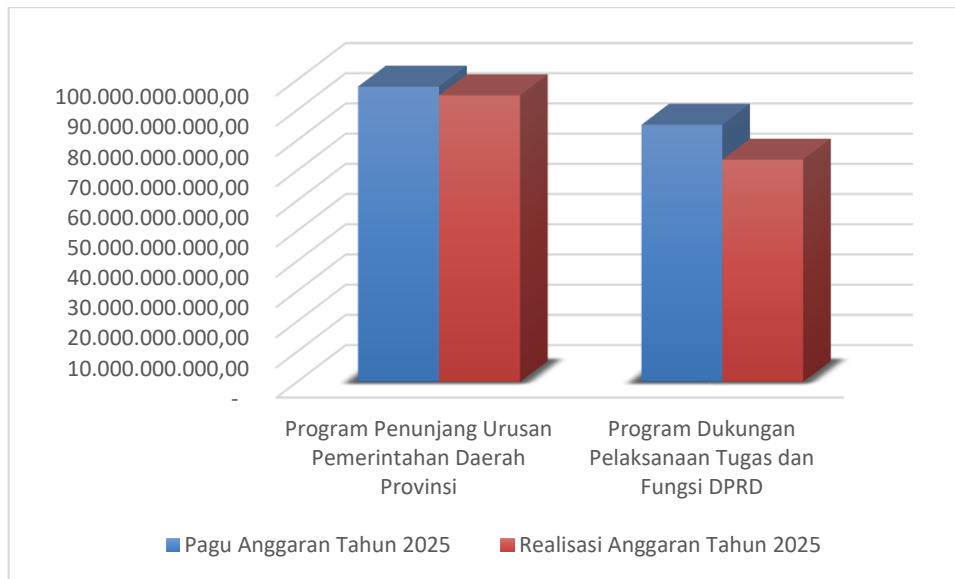
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	2. Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	85.087.153.370	73.533.960.589
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	29.216.222.332	24.282.045.490
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.313.242.200	839.688.937
		Pembahasan Rancangan Perda	6.164.249.000	3.619.455.297
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	190.896.000	180.566.601
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	338.312.000	190.283.650
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	571.370.900	544.892.539
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	20.638.152.232	18.907.158.466
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.069.480.700	3.670.805.899
		Pembahasan KUA dan PPAS	583.650.900	561.785.251
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	576.981.900	565.163.204
		Pembahasan APBD	1.764.024.900	1.417.723.459
		Pembahasan Perubahan APBD	492.880.300	481.904.490
		Pembahasan Laporan Semester	3.141.700	3.132.000
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	648.801.000	641.097.495
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.226.100.352	7.296.728.076
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.388.255.900	1.158.890.728
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktural	1.833.232.900	1.357.452.600
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.879.981.000	1.403.683.900
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.753.408.900	1.356.041.500
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.692.309.100	1.400.124.400
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	31.069.400	28.614.400
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	168.100.400	160.160.000
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	479.742.752	431.760.548
		Peningkatan Kapasitas DPRD	11.966.225.344	11.185.326.600
		Orientasi DPRD	2.516.187.924	2.246.990.772
		Pendalaman Tugas DPRD	1.909.246.600	1.885.569.385
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	545.547.300	545.519.200		

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	499.244.500	461.878.400
		Penyusunan Program Kerja DPRD	413.939.520	363.197.523
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.082.059.500	5.682.171.320
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	16.451.682.952	15.346.992.238
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	27.639.820	26.896.600
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	90.389.450	89.403.450
		Pelaksanaan Reses	16.333.653.682	15.230.692.188
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	400.029.970	314.514.135
		Penyusunan Kode Etik DPRD	163.563.600	154.881.282
		Pengawasan Kode Etik DPRD	236.466.370	159.632.853
		Fasilitasi Tugas DPRD	13.757.411.720	11.437.548.151
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.123.838.000	5.226.817.633
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	166.074.000	157.097.800
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.491.864.000	1.310.648.941
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.625.610.000	3.402.719.012

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Total belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dari anggaran Rp. 182.793.453.342,- (seratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) tercatat mencapai Rp. 168.371.606.081,- (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,11%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diimplementasikan dalam 2 (dua) Program dengan rincian pembagian anggaran dan realisasinya sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

Gambar 3.6
Realisasi Belanja per Program Tahun 2025



Pada gambar di atas terlihat bahwa penyerapan dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan serapan sebesar 86,42% lebih kecil dibandingkan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Sehingga hal ini perlu ditingkatkan kembali dalam melakukan penyerapan ditahun berikutnya. Anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,01	79,08	98,84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	97.706.299.972	94.837.645.492	97,06
2.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	91,34	92,02	100,74	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	85.087.153.370	73.533.960.589	86,42
Capaian Kinerja					99,79	Capaian Anggaran	182.793.453.342	168.371.606.081	92,11
$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$ <p>Tingkat Efisiensi = 0,08</p> $\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50$ <p>Nilai Efisiensi = 69,20%</p>									

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap capaian realiasi anggaran sebesar 0,08 dengan nilai efisiensi sebesar 69,20%. Artinya efisiensi pada Sekretariat DPRD provinsi Sumatera Barat sebesar **100%** dan sudah berhasil maksimal dalam pencapaian target kinerja. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 2 (dua) sasaran kinerja yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan dengan indikator Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, dan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Berikut rincian realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sesuai indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		SEKRETARIAT DPRD	182.793.453.342	168.371.606.081	92,11
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	97.706.299.972	94.837.645.492	97,06
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.627.900	218.148.400	99,33
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.054.900	83.920.400	98,67
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.258.000	42.913.000	99,20
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.315.000	91.315.000	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.620.454.300	12.159.673.468	96,35
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.454.765.800	11.099.572.968	96,90
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.020.977.500	915.389.500	89,66
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144.711.000	144.711.000	100,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	523.012.581	497.254.424	95,08
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	502.144.581	491.026.424	97,79
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.868.000	6.228.000	29,84
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00		

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.322.380.922	6.718.395.636	91,75
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.621.900	76.621.900	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.406.140	56.351.140	99,90
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	995.436.791	809.238.772	81,29
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.092.367.660	949.762.055	86,95
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	551.240.731	489.243.675	88,75
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	399.335.000	377.350.800	94,49
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.164.262.500	1.015.046.500	87,18
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.323.160.200	2.314.336.494	99,62
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.050.000	18.240.000	90,97
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	643.500.000	612.204.300	95,14
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.172.651.199	6.109.623.008	98,98
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.293.500.000	3.293.500.000	100,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	0	0	0,00
		Pengadaan Mebel	875.546.271	847.787.852	96,83
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.601.496.598	1.574.980.170	98,34
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.005.400	73.005.400	100,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.102.930	320.349.586	97,34
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.283.121.618	14.382.277.368	94,11
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.500.000	45.120.000	94,99
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.805.038.640	2.416.559.957	86,15
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	1.415.388.616	1.284.270.986	90,74
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.015.194.362	10.636.326.425	96,56
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.183.795.452	11.605.949.029	95,26
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.500.000	147.134.979	97,12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	973.338.000	870.602.373	89,45

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pemeliharaan Mebel	153.500.000	147.776.000	96,27
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.790.000	47.645.000	60,47
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.022.344.978	4.780.632.620	95,19
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.441.995.223	4.325.891.478	97,39
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.362.327.251	1.286.266.579	94,42
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	42.698.677.400	42.513.208.927	99,57
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	41.439.992.400	41.385.673.927	99,87
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.060.435.000	1.060.435.000	100,00
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	198.250.000	67.100.000	33,85
		Layanan Administrasi DPRD	682.578.600	633.115.232	92,75
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0	0	0,00
		Fasilitasi Fraksi DPRD	99.125.000	64.580.000	65,15
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	101.700.000	90.998.000	89,48
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	481.753.600	477.537.232	99,12
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	2. Indeks Kepuasan pemangku Kepentingan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	85.087.153.370	73.533.960.589	86,42
		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	29.216.222.332	24.282.045.490	83,11
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.313.242.200	839.688.937	63,94
		Pembahasan Rancangan Perda	6.164.249.000	3.619.455.297	58,72
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	190.896.000	180.566.601	94,59
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	338.312.000	190.283.650	56,25
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	571.370.900	544.892.539	95,37
		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	20.638.152.232	18.907.158.466	91,61
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.069.480.700	3.670.805.899	90,20
		Pembahasan KUA dan PPAS	583.650.900	561.785.251	96,25
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	576.981.900	565.163.204	97,95
		Pembahasan APBD	1.764.024.900	1.417.723.459	80,37
		Pembahasan Perubahan APBD	492.880.300	481.904.490	97,77
		Pembahasan Laporan Semester	3.141.700	3.132.000	99,69
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	648.801.000	641.097.495	98,81
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.226.100.352	7.296.728.076	79,09
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.388.255.900	1.158.890.728	83,48

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastnjktur	1.833.232.900	1.357.452.600	74,05
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.879.981.000	1.403.683.900	74,66
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.753.408.900	1.356.041.500	77,34
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.692.309.100	1.400.124.400	82,73
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	31.069.400	28.614.400	92,10
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	168.100.400	160.160.000	95,28
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	479.742.752	431.760.548	90,00
		Peningkatan Kapasitas DPRD	11.966.225.344	11.185.326.600	93,47
		Orientasi DPRD	2.516.187.924	2.246.990.772	89,30
		Pendalaman Tugas DPRD	1.909.246.600	1.885.569.385	98,76
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	545.547.300	545.519.200	99,99
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	499.244.500	461.878.400	92,52
		Penyusunan Program Kerja DPRD	413.939.520	363.197.523	87,74
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.082.059.500	5.682.171.320	93,43
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	16.451.682.952	15.346.992.238	93,29
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	27.639.820	26.896.600	97,31
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	90.389.450	89.403.450	98,91
		Pelaksanaan Reses	16.333.653.682	15.230.692.188	93,25
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	400.029.970	314.514.135	78,62
		Penyusunan Kode Etik DPRD	163.563.600	154.881.282	94,69
		Pengawasan Kode Etik DPRD	236.466.370	159.632.853	67,51
		Fasilitasi Tugas DPRD	13.757.411.720	11.437.548.151	83,14
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.123.838.000	5.226.817.633	73,37
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	166.074.000	157.097.800	94,60
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.491.864.000	1.310.648.941	87,85
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.625.610.000	3.402.719.012	93,85
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.350.025.720	1.340.264.765	99,28

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Secara umum dapat kami simpulkan bahwa sepanjang tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berusaha untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia. Perhatian khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuju kepada poin pelayanan publik di dalam kuesioner yang telah disebar ke anggota DPRD. Untuk tahun 2025 hal tersebut tentu lebih diperkuat lagi dari segi pengelolaannya.

Pelaksanaan kegiatan secara parsial yang sudah mencapai target tentu perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga Sekretariat DPRD mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat pada umumnya serta menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dari beberapa literatur, dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi



pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya. Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka ia harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal dan eksternal, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi.

Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari pemangku kepentingan yaitu para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pengguna layanan Sekretariat DPRD.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan meningkatnya etos kerja diharapkan mampu memberikan perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Perbaikan-perbaikan tersebut tentu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dengan Anggota DPRD dan Perangkat Daerah Provinsi agar fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi kedewanan bisa dijalankan dengan maksimal.
2. Mensosialisasikan dan melakukan upaya maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat "Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD" yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, agar sasaran strategis tersebut bisa dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dapat terwujud.
3. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level Staf sampai Esselon 3 bisa terus ditingkatkan.

Padang, Januari 2026
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Drs. MAIFRIZON, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680513 199512 1 005